BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Salah satunya pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang.

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi

nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila *debitur* tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). *Rahn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah

marhun bih. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang. (Ma'ruf amin, 2006:153)

Dalam penelitian Farisa Aziza (2009) tentang perspektif hukum Islam terhadap penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan di pegadaian syari'ah cabang kusumanegara Yogyakarta. Menyatakan telah sesuai dengan syariah fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah nilai taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah, pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan diskon pada tarif jasa simpan. Dalam penelitian ini dengan adanya diskon pada tarif jasa simpan tidak ada ketentuan dalam kebijakan dewan syariah nasional, dimana ketentuan fatwa dewan syariah nasional DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwasannya besarnya jumlah biaya *ijarah* tidak berdasarkan dari nilai jumlah pinjaman melainkan dari nilai taksiran harga barang yang digadaikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang mana maksud UU tersebut yaitu prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sedangkan penitipan penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Hal ini untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah.

Adapun dengan penelitian Hanisisva (2011) menyatakan. Bahwa pelaksanaan gadai syariah di pegadaian syariah cabang ujung gurun padang sesuai dengan landasan hukum fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn*. Dimana dalam pelaksanaannya dengan cara sesederhana mungkin, agar tidak mempersulit *rahin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Namun yang jadi permasalahan banyak *rahin* yang terlambat membayar angsuran, adanya *marhun* yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban *rahin* pada perum pegadaian syariah. Selama pembiayaan berjalan barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh pihak pegadaian syariah pada perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang/rusak/tak dapat dipakai.

Dengan demikian dimana dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan sipemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya.

Menurut PSAK 107 *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Berdasarkan penelitian Andi Muhammad Iqbal Zainal (2012) tentang analisis kaidah fikih dan pembiayaan *Ar-rum* (*ar-rum* untuk usaha mikro kecil) pada perum pegadaian syari'ah sangatlah detail mulai berhubungan dengan permohonan pembiayaan, juga sesuai dengan PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah* sebagian besar telah diaplikasikan oleh pegadaian syari'ah, seperti definisi, karakteristik, pendapatan sewa, piutang pendapatan sewa, beban penyewa. Jadi dapat disimpulkan dalam pencatatan pembiayaan *ijarah* berdasarkan pada PSAK 107.

Ketentuan dalam pembiayaan *ijarah* telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah berdasarkan dengan pinjaman, maka biaya sewa akan berbeda apabila jumlah pinjaman dibawah nilai maksimal.

Adapun biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan dengan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian Lisnawati (2012), tentang akuntansi pendapatan pegadaian pada perum pegadaian makasar yang membahas tentang ketentuan pendapatan pegadaian syariah terhadap standar akuntansi keuangan. Menyatakan tarif *ijarah* yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah (*murtahin*) kepada nasabah (*rahin*), telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian pendapatan administrasi dan pinjaman pada Pegadaian Syariah Makasar menggunakan metode *accrual bassis*, diakui pada saat transaksi

terjadi dan dibebankan langsung kepada nasabah pada saat penyaluran pinjaman dan dibayar lagi oleh nasabah pada saat pelunasan pinjaman.

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di PT Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah* di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah untuk dapat memahami dan mendalami sistem ekonomi syariah (dibidang Pegadaian) supaya meningkatkan pelayanan yang bermutu senantiasa antusias dengan sebuah sistem ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan tambahan sebagai referensi tentang akad gadaai syariah yang lebih baik dalam operasionalnya bagi pihak pegadaian khususnya PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi serta pembiayaan *ijarah* dengan menyesuaikan pada akuntansi syariah dan fatwa dewan syariah nasional. Penelitian ini dilakukan di PT. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.